

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan suatu perubahan kearah kemajuan yang ditujukan pada satu atau bidang kehidupan. Salah satu bidang pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan dalam bidang perekonomian berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang perlu ditingkatkan adalah pertumbuhan dan perkembangan di bidang ekonomi yaitu melalui: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Perkembangan koperasi berarti proses perubahan yang menyangkut kehidupan organisasi-organisasi koperasi yang tumbuh dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan suatu kebutuhan yang selalu dinantikan bagi setiap orang, karena kesejahteraan dipandang sebagai tolak ukur maka harus dipahami terlebih dahulu pengertian koperasi tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mana dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”

Dari definisi koperasi tersebut diketahui bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang bukan merupakan kumpulan modal dalam pelaksanaan aktivitas usahanya. Dalam pembangunan koperasi diarahkan agar koperasi

semakin memiliki kemampuan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Koperasi diharapkan menjadi lembaga-lembaga swadaya yang mandiri yang berorientasi pada kepentingan para anggotanya.

Keberadaan koperasi di Indonesia diperjelas oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mana dijelaskan pada Pasal 3 menyatakan bahwa :

“Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dari adanya keberadaan koperasi tidak hanya untuk memperoleh keuntungan yang maksimum agar dapat meningkatkan kehidupan ekonomi para pemiliknya sebagaimana perusahaan ekonomi lainnya, akan tetapi koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dimana kesejahteraan anggota sebagai pengikat utama agar anggota koperasi tetap berada di dalam sistem keanggotaan koperasi. Kesejahteraan anggota dapat diukur dari besar kecilnya atau ada tidaknya manfaat ekonomis yang diterima oleh anggota baik secara langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 pasal 16 tentang Perkoperasian mengatur mengenai penjenisan koperasi, salah satunya adalah koperasi produsen. Koperasi produsen merupakan koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia bahan atau sarana produksi,

pemrosesan dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen. Salah satu koperasi produsen di Indonesia adalah Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia atau dikenal dengan Kopti. Kopti merupakan koperasi yang dibentuk oleh para perajin kecil yang bergerak dibidang produksi kedelai menjadi tahu tempe. Kopti tersebar di beberapa wilayah yang salah satunya Kopti berada di wilayah Kota Bandung yang dinamakan Kopti Kota Bandung. Kopti Kota Bandung merupakan salah satu pusat pelayanan usaha yang menyuplai kedelai kepada masyarakat Kota Bandung yang membutuhkan kedelai sebagai bahan baku untuk industri usahanya. Koperasi ini beranggotakan para pembuat tempe dan tahu yang ada diseluruh Kota Bandung yang mana diharapkan dalam menjalankan aktivitas usahanya Kopti Kota Bandung harus mampu menangani bidang-bidang usahanya secara proporsional dan dengan perencanaan yang benar-benar dipertimbangkan dengan baik sehingga mampu mendatangkan manfaat yang besar bagi anggota dan masyarakat.

Dalam melayani anggota, koperasi membutuhkan unit-unit usaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Kopti Kota Bandung dalam menjalankan usahanya memiliki tiga unit usaha yang saling berhubungan satu sama lain yaitu usaha perdagangan kedelai, usaha perdagangan non kedelai, dan usaha simpan pinjam (USP). Ketiga jenis usaha tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, karena sebuah koperasi dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya. Mensejahterakan artinya koperasi mampu memberikan manfaat kepada anggotanya. Agar koperasi mampu memberikan manfaat kepada anggotanya, maka dalam proses berjalannya ketiga

jenis usaha tersebut koperasi sebagai lembaga ekonomi memerlukan modal yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini bukan berarti koperasi berorientasi pada modal, akan tetapi modal diperlukan untuk menjalankan kegiatan operasional koperasi dan untuk memenuhi semua kebutuhan anggotanya maka modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota (Subandi, 2013: 81).

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dari anggota maupun dari masyarakat. Modal pinjaman dapat berasal dari koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya. Modal sangat diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha koperasi. Anggota sebagai pemilik koperasi berkewajiban menyediakan modal tersebut untuk dipergunakan oleh koperasi.

Pemantapan dan peningkatan usaha koperasi tidak terlepas dari masalah modal kerja. Dimana modal kerja ini digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi sehari-hari, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada anggota sekaligus untuk mensejahterakan anggotanya. Modal kerja adalah investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lainnya (Kasmir, 2010: 300).

Dalam kegiatan operasionalnya, modal kerja yang dimiliki oleh koperasi digunakan untuk membeli persediaan barang, membayar gaji pegawai, membeli bahan baku, membayar bunga pinjaman serta untuk mendanai kegiatan lain yang menjadi kegiatan koperasi. Modal kerja yang tersedia harus cukup jumlahnya

dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari. Modal kerja yang cukup memang sangat penting dan baik bagi perusahaan maupun koperasi, akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah berapa modal kerja yang cukup bagi perusahaan atau yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mengingat pentingnya modal kerja, maka manajemen keuangan harus dapat merencanakan dengan baik besarnya jumlah kebutuhan modal kerja yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan ataupun koperasi.

Menentukan kebutuhan modal kerja merupakan hal yang sangat penting dalam koperasi, karena meliputi pengambilan keputusan mengenai jumlah dan komposisi aktiva lancar dan bagaimana membiayai aktiva tersebut. koperasi yang tidak dapat memperhitungkan tingkat modal kerja yang memuaskan, maka koperasi memungkinkan mengalami *insolvency* (tak mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo). Aktiva lancar harus cukup besar untuk dapat menutup hutang lancar sedemikian rupa, sehingga menggambarkan adanya tingkat keamanan (*margin safety*) yang memuaskan. Demikian pula bila modal kerja terlalu kecil serta perputaran yang lambat maka akan sangat mempengaruhi penentuan kebijaksanaan yang telah dibuat oleh perusahaan, maka dari itu perlu adanya pengelolaan modal kerja yang baik. Untuk melihat hal tersebut dapat diketahui menggunakan rasio likuiditas.

Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (Munawir, 2014 : 31). Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur

likuiditas yaitu *current ratio* dimana rasio ini membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Terdapat dua hasil dalam penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maka dikatakan koperasi dalam keadaan *illikuid*. Sebaliknya apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut maka dapat dikatakan koperasi dalam keadaan *likuid*.

Overlikuid adalah keadaan dimana koperasi memiliki kelebihan dana artinya jumlah dana tunai dan dana yang dapat dicairkan melimpah. Kejadian ini juga kurang baik karena ada aktivitas yang tidak dilakukan secara optimal. Manajemen kurang mampu menjalankan kegiatan operasional dengan baik, terutama dalam hal menggunakan dana yang dimiliki. Sudah pasti hal ini akan berpengaruh terhadap usaha pencapaian laba seperti yang diinginkan (Kasmir, 2016: 129).

Modal kerja memiliki sifat yang fleksibel, besar kecilnya modal kerja dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan perusahaan. Besarnya modal kerja harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, karena baik kelebihan atau kekurangan modal kerja sama-sama membawa dampak negatif bagi perusahaan. Modal yang berlebihan terutama modal kerja dalam bentuk uang tunai dan surat berharga dapat merugikan perusahaan karena menyebabkan berkumpulnya dana yang besar tanpa penggunaan secara produktif. Berdasarkan hasil penelitian dari data Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopti Kota Bandung periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 1.1
Perkembangan Modal Kerja Kopti Kota Bandung Tahun 2014-2018 Dalam Ribuan Rupiah (000)

Tahun	Kas (Rp)	N/T (%)	Piutang Usaha Anggota (Rp)	N/T (%)	Piutang Usaha Non Anggota (Rp)	N/T (%)	Persediaan (Rp)	N/T (%)	Modal Kerja (Rp)	N/T (%)
2014	306.682		626.781		498.557		589.918		1.938.723	
2015	571.743	86	2.523.769	303	854.982	71	354.932	(40)	3.826.864	97
2016	381.754	(33)	2.452.139	(3)	802.710	(6)	481.118	36	3.193.545	(17)
2017	596.334	56	2.181.903	(11)	852.463	6	363.436	(24)	2.843.532	(11)
2018	551.729	(7)	2.374.967	9	1.042.988	22	298.455	(18)	1.950.060	(31)

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa perkembangan modal kerja di Kopti Kota Bandung selama lima tahun terakhir ini modal kerja mengalami peningkatan dan penurunan. Modal kerja Kopti Kota Bandung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2015 modal kerja Kopti Kota Bandung meningkat sebesar Rp.1.888.141.237,00,- atau 97% dari tahun 2014, pada tahun 2016 modal kerja menurun sebesar Rp.633.319.413,00,- atau 17%, begitu pula pada tahun 2017 menurun sebesar Rp. 350.012.467,00,- atau 11%, dan pada tahun 2018 modal kerja menurun sebesar Rp. 893.471.709,00,-atau 31%. Pada tahun 2015 kas sebagai komponen aktiva lancar mengalami peningkatan sebesar Rp. 265.060.547, namun pada tahun 2016 kas mengalami penurunan sebesar Rp. 189.988.514, pada tahun 2017 kas kembali mengalami peningkatan, sementara pada tahun 2018 kas kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 551.729.045. Piutang usaha anggota mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.896.987.945, namun pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 piutang usaha anggota mengalami penurunan. Sementara pada tahun 2018 piutang usaha anggota kembali meningkat sebesar

Rp. 193.063.775. Piutang usaha non anggota pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 356.424.885 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 52.271.127. Sementara pada tahun 2017 dan 2018 piutang usaha non anggota mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persediaan meningkat dibandingkan tahun 2015, namun pada tahun 2017 dan tahun tahun 2018 persediaan mengalami penurunan.

Modal kerja mengalami penurunan disebabkan karena kas dan persediaan pada tahun 2018 mengalami penurunan sedangkan piutang usaha anggota dan non anggota mengalami peningkatan yang tidak signifikan sehingga permodalan Kopti Kota Bandung menumpuk di piutang. Peningkatan atau penurunan yang berbeda-beda menunjukkan bahwa adanya peningkatan atau penurunan pada aktiva lancar dan hutang lancar yang berbeda-beda. Besar kecilnya peningkatan atau penurunan pada nilai aktiva lancar dan hutang lancar dapat menyebabkan besar kecilnya nilai *current ratio*. Dengan demikian diketahui *current ratio* yang dimiliki Kopti selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Perkembangan Rasio Likuiditas Kopti Kota Bandung Tahun 2014-2018

Tahun	Aktiva Lancar (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Rasio Likuiditas		
			<i>Current Ratio</i> (%)	N/T (%)	Kriteria
2014	2.824.438.248	885.715.522	319 %		<i>Overlikuid</i>
2015	4.816.325.541	989.461.579	487 %	53	<i>Overlikuid</i>
2016	4.378.621.085	1.185.076.536	369 %	(24)	<i>Overlikuid</i>
2017	4.061.836.381	1.218.304.298	333 %	(10)	<i>Overlikuid</i>
2018	3.738.909.509	1.788.849.135	241 %	(28)	<i>Overlikuid</i>

Sumber : Pengolahan Data

Berdasarkan pada tabel 1.2. tersebut dapat dilihat bahwa Pada tahun 2017 dan sebelumnya nilai *Current Ratio* Kopti Kota Bandung selalu diatas 200% sehingga modal kerja berada dalam kriteria *overlikuid*. Nilai *current ratio* sebesar 319% pada tahun 2014, pada tahun 2015 meningkat 53% menjadi 487%, tahun 2016 menurun sebesar 24% menjadi 369%, tahun 2017 menurun sebesar 10% menjadi 333%, dan pada tahun 2018 *current ratio* meningkat sebesar 28% menjadi 241% sudah mulai normal, akan tetapi masih diatas 200%. Berdasarkan pengukuran rasio keuangan, nilai *current rasionya* berada di atas standar maksimal. Peningkatan atau penurunan *current ratio* terjadi karena aktiva lancar dan hutang lancar mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak signifikan sehingga modal kerja yang tersedia melimpah. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Standar Perhitungan Rasio Likuiditas.

Tabel 1.3.
Standar Perhitungan untuk Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas	Kriteria
175%-200%	Sangat Baik
150%- 175%	Baik
125%- 150%	Cukup Baik
125%	Kurang Baik

Sumber : Peraturan Menteri No. 06/Per/M.KUKM/V/2006

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa nilai *current ratio* rata-rata Kopti Kota Bandung selalu di atas 200%, kondisi ini menunjukkan bahwa Kopti Kota Bandung mampu membayar tagihan-tagihan dengan aktiva lancar yang tersedia, akan tetapi jika dilihat dari profitabilitas kurang bagus karena adanya alokasi dana yang tidak produktif atau modal kerja berada dalam kriteria *overlikuid*.

Modal kerja dalam kriteria *overlikuid* diketahui melalui analisis sumber dan penggunaan modal kerja koperasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Perolehan modal kerja dari sumber yang telah dipilih serta penggunaan modal kerja yang telah dilakukan selama operasi perusahaan perlu dibuatkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer keuangan. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja menggambarkan bagaimana perputaran modal kerja selama periode tertentu. Laporan ini menunjukkan kinerja manajemen dalam mengelola modal kerjanya. Modal kerja berada dalam keadaan *overlikuid* dikarenakan pengelolaan manajemen keuangan yang kurang baik sehingga modal ada yang tidak tersalurkan ke anggota karena piutang masih cukup besar yang belum memungkinkan dikonversi dengan simpanan-simpanan yang ada. Pengelolaan modal kerja merupakan suatu hal yang sangat penting karena meliputi pengambilan keputusan mengenai jumlah modal kerja yang harus tersedia dalam koperasi. Pengelolaan modal kerja yang efektif dan efisien akan menghasilkan nilai tambah dan keuntungan yang berkelanjutan, namun apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan modal kerja dapat menurunkan performa koperasi yang berdampak pada penurunan profitabilitas dan kebutuhan anggotanya.

Perkembangan Jumlah Anggota Kopti Kota Bandung selama 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2018 jumlah anggota Kopti Kota Bandung adalah sebanyak 576 orang. Akan tetapi jumlah anggota Kopti Kota Bandung pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,69% atau berkurang sebanyak 4 anggota (orang) dibandingkan pada

tahun 2017 jumlah anggota Kopti Kota Bandung sebanyak 580 orang. Berikut ini perkembangan jumlah anggota Kopti Kota Bandung.

Tabel 1.4.
Perkembangan Jumlah Anggota Kopti Kota Bandung Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Anggota	N/T %
2014	575 Orang	-
2015	572 Orang	(0,525)
2016	574 Orang	0,35
2017	580 Orang	1,05
2018	576 Orang	(0,69)

Sumber: Laporan Keuangan Kopti Kota Bandung Pada Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah anggota Kopti Kota Bandung selama lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah anggota mengalami peningkatan. Sedangkan Pada tahun 2015 jumlah anggota mengalami penurunan sebesar 0,525% atau sebanyak 3 anggota (orang), dan tahun 2018 jumlah anggota mengalami penurunan sebesar 0,69% atau berkurang sebanyak 4 anggota (orang). Dengan modal kerja yang tinggi kebutuhan anggotapun meningkat, anggota membutuhkan kedelai dan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga koperasi harus mampu melayani kebutuhan anggota dengan baik demi terlaksananya tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Kopti Kota Bandung melakukan penjualan kedelai yang berhubungan dengan pembuatan tempe tahu secara tunai berdasarkan kebutuhan para anggotanya. Oleh karena itu, kegiatan usahanya dijadikan sumber daya yang harus dijaga kesinambungan dan peningkatannya. Kopti Kota Bandung menyediakan kedelai yang berkualitas dengan impor dari Amerika untuk lima sentra usaha anggota yaitu Cibolerang, Sukahaji, Babakan, Antapani, dan Bojongloa.

Kebutuhan setiap anggota dari kelima sentra pelayanan usaha berbeda-beda setiap harinya. Berikut kebutuhan kedelai di setiap unit pelayanan koperasi

Tabel 1.5
Anggota yang Dilayani dan Kebutuhan Kedelai di Setiap Unit Kedelai Kopti Kota Bandung

Unit Pelayanan	Jumlah Anggota	Kebutuhan Kedelai (Kg/hari)
Cibolerang	70	5.400
Babakan	38	1.600
Sukahaji	23	900
Antapani	30	1.000
Bojongloa	30	1.520
Jumlah	191	10.420

Sumber : Hasil wawancara dengan sekretariat Kopti Kota Bandung

Berdasarkan Tabel 1.5 diketahui bahwa kebutuhan kedelai disetiap unit berbeda-beda, dan anggota dengan kebutuhan kedelai terbanyak yaitu pada unit pelayanan usaha yang berada di Cibolerang dengan kebutuhan kedelai sebanyak 5.400 Kg per hari. Sedangkan kebutuhan kedelai yang paling sedikit yaitu pada unit pelayanan usaha yang berada di Sukahaji dengan kedelai sebanyak 900 Kg per hari. Untuk seluruh sentra usaha anggota Kopti Kota Bandung keseluruhannya membutuhkan 10.420 Kg setiap harinya. Adapun perkembangan penjualan unit perdagangan kedelai Kopti Kota Bandung pada tahun 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 1.6
Perkembangan Target dan Realisasi Penjualan Kedelai Kopti Kota Bandung Tahun 2014-2018

Tahun	Target (Kg)	Realisasi (Kg)	Persentase %
2014	4.320.000	3.348.107	78
2015	4.000.000	3.389.108	85
2016	4.000.000	3.608.858	90
2017	4.200.000	3.803.306	91
2018	4.200.000	3.992.518	95

Sumber: Laporan Keuangan Kopti Kota Bandung Pada Tahun 2014-2018

Berdasarkan Tabel 1.6 diketahui bahwa penjualan unit perdagangan kedelai Kopti Kota Bandung mengalami peningkatan pada tahun 2014-2018. Pada tahun 2018 dengan penjualan kedelai sebesar 3.992.518 Kg dengan perkembangan peningkatan sebesar 4,97% dari tahun 2017 dan menjadi penjualan kedelai tertinggi selama lima tahun terakhir. Kopti Kota Bandung tidak pernah kekurangan untuk membeli kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu.

Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebutuhan modal kerja Kopti Kota Bandung dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 serta proyeksi perencanaan penetapan kebutuhan modal kerja untuk lima tahun yang akan datang dan bagaimana pelayanan dalam memenuhi kebutuhan kedelai anggotanya pada lima sentra usaha yang ada di Kopti Kota Bandung. Dengan demikian, harus diperhatikan pengelolaan modal kerja dan perencanaan kebutuhan modal kerja pada Kopti Kota Bandung dalam melayani kebutuhan anggotanya. Dalam pengelolaan perlu ada perencanaan yang cermat untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Manajemen keuangan koperasi harus terlebih dahulu meramalakan kondisi yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan yang kemungkinan besar berdampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian keberhasilan koperasi. Setelah meramalkan barulah menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan terutama yang berkaitan dengan keuangan di koperasi yang salah satunya yaitu kebutuhan modal kerja dan pengelolaan terhadap modal kerja. Dari segi pengelolaan permodalan koperasi sebagai badan usaha harus melakukannya dengan perhitungan yang rasional yang

mendasarkan setiap rencana usaha pada studi kelayakan. Dengan demikian akan memacu pengelola koperasi untuk selalu berfikir ekonomis yang dapat menciptakan kondisi optimal dalam koperasi sehingga dapat menunjukkan jumlah modal kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional koperasi dan mampu memenuhi kebutuhan anggotanya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kopti Kota Bandung tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai “Analisis Penetapan Kebutuhan Modal Kerja Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Bandung Dalam Upaya Melayani Kebutuhan Anggota”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang penelitian dan untuk memberi batasan-batasan pada permasalahan yang akan diambil, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa Kebutuhan Modal Kerja Tahun 2014 sampai dengan 2018 pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung Untuk Pengadaan Kedelai dan Non kedelai.
2. Bagaimana Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung Harus Menyediakan Modal Kerja Untuk Lima Tahun Yang Akan Datang Terhadap Pengadaan Kedelai dan Non Kedelai.
3. Sejauhmana Kebutuhan Anggota Terhadap Pelayanan Pengadaan Kedelai dan Non kedelai Pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah, memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian. maksud penelitian dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kebutuhan Modal Kerja pada tahun 2014 sampai dengan 2018 pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung Untuk Pengadaan Kedelai dan Non Kedelai.
2. Penetapan Kebutuhan Modal Kerja Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Bandung Untuk Lima Tahun Yang Akan Datang Terhadap Pengadaan Kedelai dan Non Kedelai.
3. Kebutuhan Anggota Terhadap Pelayanan Pengadaan Kedelai dan Non Kedelai Pada Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti sendiri dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan baik teori maupun praktik dan memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi perkembangan ilmu koperasi serta dapat dijadikan sumber informasi, referensi, dan sumbangan pikiran bagi penelitian selanjutnya yang sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Bagi koperasi yang diteliti diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan salah satu bahan masukan dan evaluasi bagi kegiatan usaha koperasi agar dapat memberikan manfaat lebih bagi anggota serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan menentukan besarnya kebutuhan modal kerja dalam melayani kebutuhan anggota pada Kopti Kota Bandung.